PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3.1/ 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.1/ 25 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Membaca : Surat Bupati Karanganyar Nomor : 100.3/3.836.1.3 tanggal 7 November 2025 Hal : Perubahan Propemperda Tahun 2025;

Menimbang :
a. bahwa pembahasan rancangan perubahan program pembentukan peraturan daerah telah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
b. bahwa dengan belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 3 (tiga) judul rancangan peraturan daerah dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2025 belum dapat diajukan oleh bupati pada tahun 2025 dan dihapus dari program pembentukan peraturan daerah tahun 2025, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.1/25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.1/25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 17);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.1/ 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 27 November 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.1/ 25 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 100.3.1/ 25 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

Pasal II

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 100.3.1/ 22 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 100.3.1/25 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/ PEMRAKARSA	TARGET PENYAM PAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH		NAS-KAH AKA-DE-MIK	PENJE-LASAN/ KETE-RANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PENYELENGGA RAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK	Pengaturan tentang kesehatan bayi dan anak yang berkaitan dengan kesehatan, gizi dan lingkungan di Kabupaten Karanganyar	Baru		2025	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2025	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Tata cara penyimpanan dokumen kepemilikan barang milik daerah 2. Pengecualian penjualan barang milik daerah dalam hal tertertu 3. tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah 4. Sewa untuk barang milik daerah dengan karakteristik/sifat khusus; dan 5. Tata cara penjualan		Ubah	2025		Penjelasan	1. Badan Keuangan Daerah 2. Inspektorat Daerah	2025	Tindak Lanjut Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas kepada Pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD dan Pegawai ASN tanpa melalui lelang.								
3.	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2029	Memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program kerja perangkat daerah	Baru		2025	NA		1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang-an 2. Seluruh Perangkat Daerah	2025	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4.	RENCANA INDUK PENGEMBANG-AN KEPARIWISATA-AN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026-2036	1. Arah pengembangan kepariwisataan 2. Dasar pembangunan Pariwisata; 3. Pemanfaatan tata ruang pariwisata 4. pembangunan daerah tujuan wisata 5. Pembangunan struktur ruang kewilayahan 6. pemasaran pariwisata 7. pengembangan produk wisata 8. pengembangan Pasar wisatawan	Baru		2025	NA		Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2025	Mencabut Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9. pengembangan industri dan investasi pariwisata.								
5.	PENYELENGGA-RAAN KETENTERAM-AN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pengaturan tentang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan umum bagi masyarakat	Baru		2025	NA		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2025	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	PENYELENGGA-RAAN PENANAMAN MODAL	1. Pengembangan iklim penanaman modal 2. Promosi penanaman modal 3. Pelayanan penanaman modal; 4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal 5. Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal; 6. Pembinaan dan pengawasan penanaman modal 7. Pengenaan sanksi 8. Kewenangan dan kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi RKPD dan arah kebijakan	Baru		2025	NA		1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang-an 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan	2025	Mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kepala Daerah yang baru 9. Kerjasama 10. Pengembang-an sistem informasi penanaman modal 11. Penyebarluas-an, Pendidikan dan pelatihan 12. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal 13. Pelaporan dan evaluasi 14. Peran serta pemerintah daerah dan masyarakat 15. Pengaduan pelaku usaha 16. Informasi data potensi dan peluang penanaman modal						Sumber Daya Mineral		

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045	1. Visi misi pembangunan daerah 2. Tujuan pembangunan industri kabupaten 3. Sasaran pembangunan industri kabupaten 4. Strategi pembangunan industri; 5. Program pembangunan industri (penentuan industri unggulan, pengembangan sarana dan prasarana industri, pembangunan sumber daya manusia industri	Baru		2025	NA		1. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja 2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2025	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035
8.	PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR	Perubahan Tipe Diskominfo dari Tipe C menjadi Tipe B		Ubah	2025		Penjelasan	1. Bagian Organisasi Setda 2. Dinas Komunikasi dan Informatika	2025	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAK-SANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT/PEMRA-KARSA	TARGET PENYAM-PAIAN
			BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;	Baru		2025		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Oktober
		b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan		Ubah	2025		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Juni
		c. Pertanggungjawab-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Baru		2025		Penjelasan	Badan Keuangan Daerah	Maret

Dipindai dengan CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	Rancangan yang harus disesuaikan guna menindakanjuti putusan Mahkamah Agung.							

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Dipindai dengan CamScanner